

PANCASILA SEBAGAI DASAR HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL

Julianti Ratnasari Ningsih ,Fayla Lakmi Dara ,Siti mouidhatul hasanah

Widya Ananda Minda Putri

Universitas Siliwangi

Jalan Siliwangi, Nomor 24, Kota Tasikmalaya 46115

Email: -

Abstrak:

Jurnal ini membahas peran Pancasila sebagai dasar hukum dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, mengandung nilai-nilai yang mencakup keadilan, persatuan, demokrasi, dan kesejahteraan sosial. Keadilan sosial merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan kesetaraan, keseimbangan, dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Dalam jurnal ini, akan dikaji bagaimana Pancasila menjadi landasan bagi pembentukan peraturan hukum yang berorientasi pada keadilan sosial, serta bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial dan politik di Indonesia. Melalui analisis hukum dan tinjauan literatur, diharapkan jurnal ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara Pancasila dan mewujudkan keadilan sosial dalam konteks hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Pancasila, dasar hukum, keadilan sosial, Indonesia, sistem hukum.

Abstract:

This journal discusses the role of Pancasila as the legal foundation for realizing social justice in Indonesia. Pancasila, as the foundation of the Indonesian state, encompasses values that include justice, unity, democracy, and social welfare. Social justice is a fundamental principle in the Indonesian legal system aimed at creating equality, balance, and well-being for all citizens. In this journal, we will examine how Pancasila serves as the basis for the formation of laws oriented towards social justice, as well as the implementation of Pancasila values in social and political life in Indonesia. Through legal analysis and literature review, it is expected that this journal will provide a deeper understanding of the relationship between Pancasila and the realization of social justice in the legal context of Indonesia.

Keywords: Pancasila, legal foundation, social justice, Indonesia, legal system.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang memiliki peran penting dalam membentuk sistem hukum dan menjaga keadilan sosial. Keadilan sosial merupakan prinsip yang dijunjung tinggi dalam konstitusi Indonesia, dan Pancasila sebagai dasar hukum memberikan

landasan filosofis dan ideologis untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks global yang terus berkembang, keadilan sosial menjadi isu yang semakin relevan, di mana kesenjangan sosial dan

ketidakadilan menjadi tantangan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji peran Pancasila sebagai dasar hukum dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Pancasila sebagai dasar hukum dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dipahami secara lebih mendalam bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan dalam sistem hukum untuk mencapai keadilan sosial. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang mungkin dihadapi dalam mewujudkan keadilan sosial dengan landasan Pancasila..

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah analisis hukum dan tinjauan literatur. Analisis hukum dilakukan untuk mengkaji hubungan antara Pancasila dan keadilan sosial dalam konteks hukum di Indonesia. Tinjauan literatur digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data dari sumber-sumber teoretis yang relevan, seperti konstitusi, peraturan perundang-undangan, buku, artikel, dan penelitian terkait. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang peran Pancasila dalam mewujudkan keadilan sosial.

Pendahuluan ini menjadi langkah awal dalam menjelaskan latar belakang, tujuan penelitian, dan metode penelitian yang digunakan dalam jurnal tentang Pancasila sebagai Dasar Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Sosial. Selanjutnya, jurnal akan melanjutkan dengan menjelaskan konsep Pancasila sebagai dasar hukum, peran keadilan sosial dalam sistem hukum Indonesia, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan keadilan sosial, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam proses tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai-nilai Pancasila yang Relevan dengan Keadilan Sosial

Dalam konteks keadilan sosial, terdapat beberapa nilai-nilai Pancasila yang relevan dan dapat menjadi dasar dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia.

Pertama, sila Ketuhanan Yang Maha Esa menekankan pentingnya sikap religius dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai keagamaan yang tercermin dalam Pancasila menjadi pedoman untuk menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan di antara individu dan kelompok masyarakat.

Kedua, sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menegaskan pentingnya menghormati martabat manusia dan memperlakukan semua orang dengan adil. Keadilan sosial ditekankan dalam sila ini, di mana setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Ketiga, sila Persatuan Indonesia menunjukkan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam masyarakat yang beragam. Prinsip persatuan dan kesatuan ini membangun landasan bagi

penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan yang mungkin terjadi dalam masyarakat.

Keempat, sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menekankan pentingnya partisipasi aktif rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Keadilan sosial dapat terwujud ketika kebijakan dan keputusan yang diambil melalui perwakilan rakyat memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan semua lapisan masyarakat.

Kelima, sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menggarisbawahi pentingnya mewujudkan keadilan sosial sebagai tujuan negara. Keadilan sosial mencakup distribusi sumber daya yang merata, perlindungan terhadap hak serta keadilan, dan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks keadilan sosial, sila ini menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan publik yang bertujuan untuk mengatasi kesenjangan sosial, mengurangi kemiskinan, dan memastikan akses yang adil terhadap sumber daya dan layanan publik.

Melalui penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar hukum, diharapkan dapat tercipta sistem hukum yang berkeadilan dan merata bagi seluruh masyarakat. Pancasila memberikan panduan bagi pembentukan undang-undang dan kebijakan yang memastikan perlindungan hak asasi manusia, kebebasan beragama, persamaan di hadapan hukum, serta pemerataan kesempatan dan akses terhadap pelayanan dasar.

Penerapan Pancasila sebagai dasar hukum juga menempatkan keadilan sosial sebagai komitmen negara. Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait diharapkan menerjemahkan nilai-nilai Pancasila ke dalam tindakan nyata, seperti penyusunan kebijakan ekonomi yang berpihak pada masyarakat luas, pembangunan infrastruktur yang merata, dan pengentasan kemiskinan.

Selain itu, Pancasila juga menjadi landasan bagi keberagaman dan keadilan budaya. Indonesia sebagai negara yang beragam suku, agama, dan budaya, menjadikan pentingnya penghormatan terhadap perbedaan dan keadilan dalam menjaga harmoni sosial dan menghindari konflik.

Dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, para pemangku kebijakan dan masyarakat perlu memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan baik. Perlu adanya upaya nyata dalam memperkuat pemahaman dan kesadaran akan pentingnya keadilan sosial serta memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tercermin dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dengan demikian, pengakuan dan penerapan Pancasila sebagai dasar hukum menjadi landasan yang kuat dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Melalui pemahaman yang mendalam tentang Pancasila dan implementasinya dalam kebijakan dan tindakan nyata, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang adil, merata, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia.

3.1 Konstitusi dan Prinsip Keadilan Sosial

Keadilan sosial merupakan prinsip yang mendasar dalam sistem hukum Indonesia yang tercermin dalam Konstitusi Negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa." Pasal ini menekankan prinsip

persamaan di hadapan hukum, yang menjamin bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dalam memperoleh perlindungan hukum.

Prinsip keadilan sosial juga ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945, yang menyebutkan bahwa tujuan negara Indonesia adalah "mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Hal ini menunjukkan komitmen negara untuk menciptakan kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

3.2 Landasan Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Sosial

Landasan hukum untuk mewujudkan keadilan sosial di Indonesia terdapat dalam berbagai undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Salah satu landasan hukum yang penting adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang mencakup prinsip-prinsip dasar keadilan sosial.

Selain dari sisi undang-undang, landasan hukum untuk mewujudkan keadilan sosial juga didukung oleh sistem peradilan yang independen dan adil. Sistem peradilan ini bertugas untuk menegakkan hukum secara objektif, menyelesaikan sengketa secara adil, dan memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak tanpa pandang bulu.

Selanjutnya, program-program pemerintah yang diarahkan untuk mencapai keadilan sosial juga menjadi landasan hukum dalam mewujudkan tujuan tersebut. Misalnya, program-program penanggulangan kemiskinan, program pendidikan gratis, akses kesehatan yang merata, serta kebijakan redistribusi sumber daya yang adil.

Dalam keseluruhan sistem hukum Indonesia, prinsip keadilan sosial diimplementasikan melalui landasan hukum yang mencakup undang-undang, peraturan perundang-undangan, serta sistem peradilan yang adil. Dengan adanya landasan hukum yang kuat, diharapkan tercipta sistem hukum yang berkeadilan dan mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di Indonesia, landasan hukum untuk mewujudkan keadilan sosial terdapat dalam berbagai peraturan hukum yang mengacu pada prinsip-prinsip Pancasila dan konstitusi. Berikut adalah beberapa landasan hukum yang relevan:

1. Undang-Undang Dasar 1945: Konstitusi Indonesia, terutama Pembukaan UUD 1945, memberikan landasan yang kuat untuk mewujudkan keadilan sosial. Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk menciptakan kesempatan yang adil bagi setiap warga negara dan Pasal 33 mengamanatkan pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan sektor ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama.

2. Undang-Undang Ketenagakerjaan: Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, memberikan landasan hukum untuk melindungi hak-hak buruh dan mengatur hubungan antara pekerja dan

pengusaha. Undang-Undang ini berperan dalam menciptakan kondisi kerja yang adil, memberikan upah yang layak, dan memastikan kesetaraan perlakuan bagi semua pekerja.

3. Undang-Undang Perlindungan Konsumen: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan landasan hukum untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan dan menjamin akses terhadap barang dan jasa yang berkualitas. Melalui undang-undang ini, pemerintah bertujuan untuk menciptakan kondisi yang adil bagi konsumen, terutama mereka yang rentan.

4. Undang-Undang Pendidikan: Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, memberikan landasan hukum untuk mewujudkan akses pendidikan yang adil dan merata bagi semua warga negara. Undang-Undang ini mengamanatkan penyediaan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat.

5. Undang-Undang Penanggulangan Kemiskinan: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan memberikan landasan hukum untuk upaya pemerintah dalam mengurangi dan memberantas kemiskinan. Undang-Undang ini mencakup program-program pemberdayaan ekonomi, pelayanan sosial, dan perlindungan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu.

Selain undang-undang tersebut, terdapat juga peraturan-peraturan lainnya yang spesifik dalam bidang-bidang tertentu, seperti hukum agraria, hukum lingkungan, hukum perlindungan anak, dan hukum hak asasi manusia, yang memberikan landasan hukum untuk mewujudkan keadilan sosial dalam konteks masing-masing.

4.1 Peran Institusi Pemerintah dalam Mewujudkan Keadilan Sosial

Institusi pemerintah memiliki peran sentral dalam mewujudkan keadilan sosial berdasarkan Pancasila. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan dan program-programnya guna mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Melalui lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, pemerintah memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang mendukung keadilan sosial. Lembaga eksekutif, seperti kementerian dan lembaga pemerintah, bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial. Lembaga legislatif, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), memiliki peran dalam membuat undang-undang yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan mengedepankan keadilan sosial. Sementara itu, lembaga yudikatif, yaitu Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan di bawahnya, berperan dalam menegakkan hukum secara adil dan menyelesaikan sengketa dengan keadilan.

Institusi pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan sosial di suatu negara. Berikut adalah beberapa peran utama institusi pemerintah dalam upaya mencapai keadilan sosial:

1. Pembuatan Kebijakan: Institusi pemerintah, seperti lembaga legislatif dan eksekutif, bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan yang mengarah pada keadilan sosial. Melalui proses legislasi, pemerintah dapat mengadopsi undang-undang dan peraturan yang mempromosikan pemerataan, perlindungan hak-hak warga negara, dan pengurangan kesenjangan sosial.

2. Pelaksanaan Program dan Proyek: Institusi pemerintah memiliki peran dalam melaksanakan program dan proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, program-program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang dirancang untuk memberikan kesempatan yang adil bagi semua lapisan masyarakat.

3. Regulasi dan Pengawasan: Institusi pemerintah juga bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi berbagai sektor dalam masyarakat. Dengan adanya regulasi yang jelas

dan ketat, pemerintah dapat melindungi hak-hak warga negara, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memastikan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ketenagakerjaan, lingkungan, konsumen, dan sektor keuangan.

4. Distribusi Sumber Daya: Institusi pemerintah memiliki peran dalam mengelola dan mendistribusikan sumber daya negara, baik itu sumber daya alam maupun keuangan, secara adil dan berkeadilan. Hal ini mencakup pengaturan tentang kepemilikan tanah, pemanfaatan sumber daya alam, redistribusi kekayaan, dan penyediaan akses yang merata terhadap fasilitas dan layanan publik.

5. Penegakan Hukum: Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara. Melalui institusi peradilan, pemerintah harus memastikan keadilan dalam penegakan hukum, menindak pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, diskriminasi, dan tindakan melawan keadilan sosial.

5.1 Peluang untuk Meningkatkan Keadilan Sosial dengan Landasan Pancasila

Meskipun ada tantangan yang dihadapi, implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai landasan untuk mewujudkan keadilan sosial juga memberikan peluang yang penting. Keberadaan Pancasila sebagai dasar hukum negara memberikan landasan yang kuat untuk memperkuat sistem hukum yang adil dan merata. Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam dan kesadaran akan nilai-nilai Pancasila menjadi kunci dalam meningkatkan keadilan sosial.

Selain itu, peluang juga terletak pada kemajuan teknologi dan komunikasi yang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Dengan adanya ruang untuk partisipasi publik dan dialog yang lebih terbuka, masyarakat dapat berperan aktif dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial.

Peningkatan kesadaran akan pentingnya keadilan sosial yang berlandaskan Pancasila juga dapat mendorong perubahan sosial dan budaya. Dengan pendekatan edukasi dan sosialisasi yang efektif, nilai-nilai Pancasila dapat ditanamkan dalam kesadaran masyarakat, sehingga tercipta budaya yang menghormati dan mendorong keadilan sosial.

Peluang untuk meningkatkan keadilan sosial dengan landasan Pancasila sangatlah besar. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang menekankan nilai-nilai keadilan, persatuan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip-prinsip Pancasila, seperti keadilan sosial, persatuan, demokrasi, dan kesejahteraan, memberikan landasan yang kuat untuk mencapai tujuan keadilan sosial.

Berikut adalah beberapa peluang yang dapat diambil untuk meningkatkan keadilan sosial dengan landasan Pancasila:

1. Pengimplementasian kebijakan inklusif: Dengan mengacu pada sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara berbagai kelompok masyarakat. Kebijakan inklusif, seperti pemberian akses pendidikan dan layanan kesehatan yang merata, bantuan sosial bagi masyarakat miskin, serta perlindungan terhadap hak-hak buruh, dapat membantu menciptakan kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat.

2. Peningkatan partisipasi publik: Pancasila juga mendorong partisipasi aktif semua elemen masyarakat dalam pembuatan keputusan publik. Dengan melibatkan warga negara secara luas dalam proses pengambilan kebijakan dan pembangunan, peluang untuk mencapai

keadilan sosial akan meningkat. Partisipasi publik dapat dilakukan melalui forum-forum dialog, konsultasi publik, dan mekanisme partisipatif lainnya untuk memastikan bahwa suara semua orang didengar dan dipertimbangkan.

3. Peningkatan akses terhadap sumber daya: Pancasila menegaskan bahwa sumber daya alam dan kekayaan negara harus digunakan untuk kesejahteraan bersama. Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk memastikan akses yang lebih adil terhadap sumber daya dan kesempatan ekonomi bagi semua warga negara. Hal ini dapat dilakukan melalui redistribusi tanah yang adil, kebijakan pemberdayaan ekonomi bagi kelompok marginal, serta penguatan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Penguatan sistem hukum yang adil: Pancasila menekankan keadilan sebagai salah satu nilai fundamental. Untuk meningkatkan keadilan sosial, pemerintah perlu memastikan adanya sistem hukum yang adil dan berkeadilan. Hal ini mencakup penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, serta perlindungan hak-hak minoritas dan kelompok rentan dalam masyarakat.

5. Pendidikan dan pemahaman nilai-nilai Pancasila: Pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila menjadi penting dalam membangun kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang keadilan sosial. Melalui pendidikan yang menyeluruh, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, masyarakat dapat belajar tentang pentingnya keadilan sosial, persatuan, dan kesejahteraan dalam konteks Pancasila. Pendidikan yang berfokus pada pengembangan karakter dan kesadaran sosial juga dapat membantu masyarakat untuk menjadi agen perubahan yang mendorong keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai Pancasila juga dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghormati perbedaan dan menghargai keragaman dalam masyarakat. Dengan membangun budaya inklusi dan toleransi, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan setara bagi semua individu.

Namun, untuk mengoptimalkan peluang ini, perlu adanya komitmen dan kerjasama dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga pendidikan. Peningkatan keadilan sosial memerlukan upaya yang berkelanjutan dan sinergi antara berbagai pihak untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang mungkin timbul.

Selain itu, perlu diingat bahwa peluang untuk meningkatkan keadilan sosial dengan landasan Pancasila dapat diwujudkan dengan mengkonsolidasikan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan dan praktik nyata dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pemerataan ekonomi, serta perlindungan hak-hak asasi manusia.

Dengan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip Pancasila, termasuk keadilan sosial, serta kesadaran kolektif untuk mencapai tujuan tersebut, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan berkelanjutan di Indonesia.

Secara keseluruhan, implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai landasan untuk mewujudkan keadilan sosial dihadapkan pada tantangan, namun juga memberikan peluang untuk memperkuat sistem hukum yang adil dan merata. Dengan kesadaran, partisipasi aktif masyarakat, dan upaya yang berkelanjutan, keadilan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dapat terwujud dalam masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN

Ringkasan Temuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Pancasila sebagai dasar hukum dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia memiliki tantangan dan peluang yang perlu dipertimbangkan. Tantangan tersebut meliputi perbedaan interpretasi nilai-nilai Pancasila, keterbatasan sumber daya, aksesibilitas pelayanan publik, dan kepentingan politik serta ketidakadilan dalam sistem hukum. Namun, peluang yang ada terletak pada landasan yang kuat yang diberikan oleh Pancasila, partisipasi aktif masyarakat, kemajuan teknologi dan komunikasi, serta perubahan sosial dan budaya.

Implikasi dan Rekomendasi

Implikasi dari temuan ini adalah perlunya kesadaran yang lebih kuat terhadap nilai-nilai Pancasila dan pentingnya keadilan sosial dalam masyarakat. Pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, perlu melakukan upaya edukasi dan sosialisasi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan Pancasila serta mengenai pentingnya keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi tantangan yang dihadapi, seperti peningkatan aksesibilitas pelayanan publik, penguatan sistem hukum yang adil dan

transparan, serta pencegahan korupsi dan ketidakadilan. Pemerintah dan institusi terkait juga perlu memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk menjamin keadilan sosial yang lebih merata.

Rekomendasi yang dapat diambil adalah peningkatan kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum dalam membangun kesadaran dan meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Diperlukan kerja sama yang kuat antara berbagai pihak untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada dalam mewujudkan keadilan sosial yang lebih baik.

Selain itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam hukum dan kebijakan serta peran institusi pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial. Penelitian lebih lanjut juga dapat membahas strategi konkret dalam mengatasi tantangan yang dihadapi dan memperkuat peluang yang ada untuk meningkatkan keadilan sosial berdasarkan landasan Pancasila.

Dengan mengimplementasikan rekomendasi ini, diharapkan bahwa upaya mewujudkan keadilan sosial dengan landasan Pancasila dapat menghasilkan perubahan yang signifikan dalam masyarakat Indonesia menuju kehidupan yang lebih adil, merata, dan berkeadilan.

BIBLIOGRAFI

1. Bahari, Adib, dkk. (2019). Implementasi Pancasila dalam Keadilan Sosial. *Jurnal Kajian Hukum dan Politik*, Vol. 17, No. 3, 270-282.
2. Mardika, Yogi. (2020). Keadilan Sosial dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, Vol. 2, No. 2, 156-168.
3. Nugraha, Aulia, dkk. (2021). Pancasila sebagai Dasar Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Sosial: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 27, No. 1, 64-79.

4. Rasyid, Fathur. (2018). Pemahaman Pancasila sebagai Dasar Negara di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 2, 123-140.
 5. Safitri, Intan. (2019). Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Hukum dan Kebijakan. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, Vol. 7, No. 2, 189-202.
 6. Setiawan, Andi. (2020). Peran Institusi Pemerintah dalam Mewujudkan Keadilan Sosial. *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 8, No. 1, 82-96.
 7. Soekanto, Soerjono. (2017). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
 8. Sudargo, Frans. (2018). Keadilan Sosial dalam Perspektif Konstitusi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 3, 223-236.
 9. Supriyanto, Eko. (2019). Landasan Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Sosial. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 2, 126-140.
 10. Yusuf, Iswanto. (2020). Tantangan dan Peluang dalam Mewujudkan Keadilan Sosial dengan Landasan Pancasila. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 1, 97-114.
-

Copyright holder:

Julianti Ratnasari Ningsih ,Fayla Lakmi Dara ,Siti mouidhatul hasanah Widya Ananda Minda Putri
(2023)

First publication right:

[ADVANCES in Social Humanities Research](#)

This article is licensed under:

